

ABSTRAK

FRAMING DALAM AKSI PENOLAKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PILKADA 2024 PADA AKUN @NARASI.TV

Oleh

DEA ISMAN OKTAVIANI

Pada tahun 2024, revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang dilakukan oleh DPR mendapat penolakan luas dari berbagai elemen masyarakat sipil karena dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan dianggap memperkuat praktik politik dinasti. Isu ini kemudian menjadi sorotan berbagai media, salah satunya akun Instagram @narasi.tv yang secara aktif membingkai isu ini melalui media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk *framing* yang dilakukan oleh akun Instagram @narasi.tv dalam membingkai aksi penolakan revisi RUU Pilkada 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital dan studi pustaka, dengan jumlah postingan yang menjadi unit analisis sebanyak 12 unggahan dari akun @narasi.tv. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* model William A. Gamson dan Modigliani yang terdiri dari core frame, condensing symbols, perangkat *framing*, serta perangkat reasoning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun @narasi.tv membentuk lima isu utama dalam *framing* penolakan revisi RUU Pilkada, yaitu: ketimpangan legislasi dan akses kekuasaan, politik dinasti, krisis demokrasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta partisipasi publik dan solidaritas sipil. Kelima isu tersebut dibangun melalui penggunaan metafora, catchphrases, visual image, exemplar, dan depiction, serta diperkuat oleh reasoning seperti roots, appeal to principle, dan consequences. *Framing* ini tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga mendorong mobilisasi publik dan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga demokrasi.

Kata kunci: *framing*, media sosial, @narasi.tv, RUU Pilkada, gerakan sosial, demokrasi, politik dinasti

ABSTRACT

FRAMING IN THE PROTEST AGAINST THE 2024 REGIONAL ELECTION BILL (RUU PILKADA) ON THE @NARASI.TV INSTAGRAM ACCOUNT

By

DEA ISMAN OKTAVIANI

In 2024, the revision of the Pilkada Bill (RUU) by the DPR received widespread rejection from various elements of civil society, as it was considered to contradict the Constitutional Court's decision and to reinforce the practice of dynastic politics. This issue then became the focus of various media outlets, including the Instagram account @narasi.tv, which actively framed the issue through social media. This study aims to examine the form of framing carried out by the Instagram account @narasi.tv in relation to the public protest against the revision of the 2024 Pilkada Bill. A qualitative descriptive approach was used in this study. Data were collected through digital documentation and literature review, with 12 posts from the @narasi.tv account serving as the units of analysis. The data were analyzed using the framing analysis model developed by William A. Gamson and Andre Modigliani, which consists of core frames, condensing symbols, framing devices, and reasoning devices. The findings show that the @narasi.tv account constructed five main issue frames in its coverage of the rejection of the Pilkada Bill revision: inequality in legislation and access to power, dynastic politics, democratic crisis, abuse of power, and public participation and civil solidarity. These issues were framed using metaphors, catchphrases, visual images, exemplars, and depictions, and were further reinforced through reasoning devices such as roots, appeals to principle, and consequences. This framing not only delivered critical perspectives but also encouraged public mobilization and fostered collective awareness about the importance of protecting democratic values.

Keywords: *framing, social media, @narasi.tv, Pilkada Bill, social movements, democracy, dynasty politics*